

Lampiran 1
Formulir Identifikasi

KEMENTERIAN NEGERI SAMPAL KANTON PERUBAHAN
KUALIPKADIN/INDONESIA

NOMOR:

REVISI:

PENCACULAN:/...../.....
di **ALAT TUKANG DI**

KEMENTERIAN NEGERI SAMPAL KANTON PERUBAHAN
KUALIPKADIN/INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dan tanggal
terdapat dalam di Nomor Surat yang
berhubungan dengan ini

Membaca : a. Bahwa pemohon, mengajukan permohonan
untuk memperoleh (Pilih ... atau tidak
sesuai hasil pengukuran kadaster, yang
dihasilkan dalam Surat Ukur/Gambar
Surat tanggal Nomor/.....
/.....) (pilih di Ukur/Kadaster)
Kawasan Kabupaten/Kota/daerah
....., Provinsi

- b. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Pengukuran
Kawasan/ Rangkap yang ditunjukkan
dalam Laporan Kadaster/Hasil Pengukuran
Surat yang ditunjukkan dalam Surat
Ukur/Gambar Permohonan Surat Ukur yang
ditunjukkan dalam Hasil Pemeriksaan
Surat Ukur tanggal Nomor
pemohon memperoleh hasil surat
kadaster yang tidak (pilih)
memperoleh surat surat
dapat tertera permohonan dan
pengukuran kadaster (pilih)
- c. Bahwa tidak terdapat permohonan surat
tidak memuatnya surat dan tidak sesuai
dengan kebijakan Perantara menurut
kemampuan perantara penyalang sehingga
yang tidak, maka permohonan surat
tidak dapat dibatalkan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
1999
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
1999 (pemerintah)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
1999
 5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999
 6. Keputusan Presiden Nomor .../Tahun.....
 7. Keputusan Kepala Badan Perantara
Kadaster Nomor 1 Tahun 1999

8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1999
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun....]

DAFTAR LAMPIRAN:

**Menyatakan
PENGALIHAN**

- Menambah pemohonan hak
dari di atas/kepada/kepada
atau tidak yang sudah (di/ke
[.....]) berada di Desa/Kelurahan
..... Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya Provinsi
....., Surat Ukur/Cadangan Sertifikat
tanggal Nomor

SEKILAS

- Apabila diketahui hak tersebut dapat
diklasifikasikan/kecukupan dalam pemohonannya,
keputusan ini akan dituangkan kembali
keputusan lainnya.

SEKILAS

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

DIKEMUKAKAN OLEH :
PADA LAMPIRAN :

DR. MENDIRIBENCANA/DR. MENDIRI/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya.....

[.....]

DI PADA:

.....
.....

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan ini ditandatangani kepada:

1. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Bidang Hak-Hak atas Tanah Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Provinsi) di

Lampiran 1
Formulir Ikon 2013

KEMENTERIAN KEPALA KANTON WILAYAH
Badan PERIKLAMAN NASIONAL PRIFUNG
NOMOR:
(MELANG)
PERINGKAT:
a. Jenis Tindakan: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.

KEMENTERIAN KEPALA KANTON WILAYAH
Badan PERIKLAMAN NASIONAL PRIFUNG

Mendaftar : Nama pemohon dan tanggal
berdasarkan di Nomor bilik yang
berhubungan dengan ini.

Mengalok : a. Bilah pemohon, mengajikan permohonan
ini ... dan alahing telah sama baik
pengalokan (bahasa) yang diberikan
dalam Nama Ulu/Cadua Nama tanggal
..... Nama (M)
terletak di (Nama/Kelurahan)
Kawasan Kabupaten/
Kacamada Propinsi

b. Bilah telah yang diberikan adalah telah
..... yang telah diberikan pemohon baik
sama pada setiap sama baik

sehingga diberikan dalam baik
pemohon (Nama/Kawasan) (Nama)
yang diberikan dalam laporan
Kawasan/ (Nama) (Nama) (Nama) yang
diberikan dalam Nama Nama/ (Nama)
Permohonan (Nama) a. atau b) yang
diberikan dalam bilah Nama
Permohonan (Nama) a. atau b) tanggal
nama (optional).

1. Bilah pemohon telah (nama) setiap
pemohon telah terlahit sama ... sama
dengan terlahit pemohon dan
pengalokan terlahit.

2. Bilah pemohon terlahit telah
diberikan sama berdasarkan (Nama)
Nama Permohonan (Nama) (Nama)
sama terlahit tanggal
Nama (Nama) sama pemohon
(Nama) (Nama) di ini diberikan pada (Nama)
(Nama).

3. Bilah berdasarkan baik baik terlahit di atas
sama pemohon (Nama) diberikan
dapat diperbahagikan sama di (Nama).

Mengalok : 1. (Nama) (Nama) Nama U (Nama) (Nama)
2. (Nama) (Nama) Nama W (Nama) (Nama)

1. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 10 Tahun 1959 (sppasas)
2. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 20 Tahun 1959
3. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 21 Tahun 1959 (sppasas)
4. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 1959
5. Keputusan Presiden Nomor 201 Tahun 1959
6. Keputusan Presiden Nomor ... Tahun ...
7. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 1 Tahun 1959
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 2 Tahun 1959/ta Nomor 1 Tahun 1959
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 3 Tahun 1959
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor ... Tahun ...

Artikel 103 (1) UUD 1945:

Mencakupi PERILAKU
 1. Menerikan persetujuan/izin sebagai dimandak dalam persetujuan izin / tidak-amanat tidak akan (girik, paman, pajiak hasil bumi, lerau + di) yang sama dengan (ta) ama nama atau 100 yang terdapat di UUD/Ketahanan Kesatuan

....., Kabupaten/Kotamadya Propinsi yang sama baik, girik paman, pajiak hasil bumi, lerau + di sama (ta), dan lainnya sebagaimana dimandak dalam lampiran keputusan (ta) dan menerikannya sebagai tanah yang langsung diterima oleh Negara serta tidak terbelah lagi sebagai tanah hasil-hak yang asli (jika diperlihatkan)

1. Menerikan/izin kepada Kepala Kantor Perencanaan/Kabupaten/Kotamadya untuk menerik persetujuan girik, paman, pajiak hasil bumi, lerau + dan lainnya terdapat di UUD 1945 dan menerikannya dan hasil-hak, persetujuan serta daftar nama lainnya dan menerik dalam girik, paman, pajiak hasil bumi, lerau + dan lainnya. (jika diperlihatkan)

1. Menerikan/kepada berkebidanan di / hak dalam pajiak selain nama / selain / selain, persetujuan tanggung jawabnya di Kantor Perencanaan Kabupaten/Kotamadya ama selengkap tanah atau 100 [.....] sebagaimana diterangkan dalam UUD 1945/Ketahanan, UUD/Per, UUD/ta, tanggung Nomor terdapat di UUD/Ketahanan Kesatuan Kabupaten/Kotamadya Propinsi

..... dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Segala akibat biaya, untung dan rugi yang timbul karena pelaksanaan hak ini dianggap dan segala tindakan atau program yang yang dilaksanakan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemohon hak.
2. Hak yang sudah selesai harus diberi tanda, baik secara umum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus dipelihara kelengkapannya.
3. Tanah sudah selesai dipertah dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan akan serta harus tetap dari hak yang diberikan.
4. Pemohon/hak dipertah membayar biaya yang ditentukan kepada Negara melalui Bendahara Umum/pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Biaya pada Hak Negara sebesar Rp.....[.....]

b. Biaya pada Hak Perseorangan Tanah Kabupaten/Kotamadya

sebesar Rp.....[.....]

c. Biaya pada Hak Perseorangan Tanah Propinsi sebesar Rp.....

[.....]

5. Pemohon/hak utung dan Perseorangan Hak atau Tanah dan atau bangunan selanjutnya agar terwujud kepastian, ia harus harus dibayar oleh pada saat terwujud di Hak Kabupaten/Kotamadya/Propinsi atau Kotamadya Administratif yang meliputi tanah hasil dan atau bangunan (pemukim).
6. Menandatangani hak atas tanda yang Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya

REVISI

1. Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat, pemohon hak harus terlebih dahulu membayar biaya yang ditentukan kepada Negara dan menandatangani hak atas tanda yang bersangkutan dipertahakan pada Kantor BPPA-A (atau P. dan) setelah di atas diberikan, sebanyak 2 (dua) [.....] bulan agar terwujud kepastian hak dengan memperhatikan nilai surat antara Hak Perseorangan Hak atau Tanah dan atau bangunan serta memperhatikan

Kemampuan pada Kantor Perumahan
Kotapontor/Kotamadya -----

MILIKAN : Hak ----- ini sudah berlaku selingkuh sejak
tanggal dibelanjakan pada Kantor Perumahan
Kotapontor / Kotamadya -----

MILIKAN : Kepuasan Pembelian (Hak... ini hasil dengan
mendapat, apabila pemerintah tak sudah
memenuhi kewajiban kepada pada Likwidasi
KITA.A dan Likwidasi KITA.P).

MILIKAN : Mengetahui segala urusan yang berhubungan
dengan pembelian Hak ... ini pemerintah tak
dapatnya memiliki dan/atau pada Kantor
Perumahan Kotapontor / Kotamadya -----

MILIKAN : Apabila dikemukakan hal tersebut selingkuh
kelebihan/kelebihan dalam penanganannya,
keputusan ini akan ditinjau kembali
selingkuh selingkuh

MILIKAN : Kepuasan ini berlaku sejak tanggal dibelanjakan

DISKONPLAN IN :
Pada/Levikasi :

DR. HENDRIK MURDANI M.Si/Dr./
MILIKAN Badan PBB/Levikasi (Nasional,
Kepala Kantor Wilayah Badan Perumahan
Nasional Program) -----

MIPada:

MILIKAN Kepuasan ini dibelanjakan kepada (Hak :

1. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Perumahan Nasional
di Jakarta.
2. Kepala Bidang (Hak/Hak atau Wakil Badan Perumahan
Nasional di Jakarta.
3. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi ----- di -----
4. Kepala Badan Kemasyarakatan Badan Perumahan Nasional di Jakarta
5. Kepala Badan (Hak/Hak) Badan Perumahan Nasional di Jakarta
6. Kepala Bidang (Hak/Hak atau Wakil Kantor Wilayah Badan
Perumahan Nasional Program) ----- di -----
7. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II -----
di -----
8. Kepala Kantor Perumahan Kotapontor/Kotamadya -----
di -----
9. Kepala Kantor Perumahan dan Hak Negara di -----
10. Kepala Kantor Pagar Bani dan Bepangan di -----

Lampiran 1
Formulir Isian 01A

KEMENTERIAN KEPALA KANTON/KEWILAYAHAN
BALAIAN PERIKLANSANAN NASIONAL (PKNAS) _____
NOMOR : _____
(MELAWAN)
PINDA/ALIAS : _____ ALIAS/ALIASA : _____
ALIAS/ALIASA/ALIASA : _____

KEMENTERIAN KEPALA KANTON/KEWILAYAHAN
BALAIAN PERIKLANSANAN NASIONAL (PKNAS) _____

Mendawa : 1. Surat permohonan diakhiri _____ tanggal _____
terkubahkan di _____ Nomor balai yang
terkubahkan dengan No _____

Mendatang : a. Balai pemohon, sampaikan permohonan
untuk memperoleh hasil _____ atau hasil
sewa hasil pengurusan balai yang
disebut dalam Surat (Kor/Cambor
Nomor tanggal _____ Nomor _____
No _____) terbit di Balai/Kabupaten

Kantoran _____
Kaharapan/Kantondya _____
Pegawai _____

b. Balai secara hasil permohonan Penges
Kantondya Request yang ditampal

dalam Laporan Kemajuan/Hasil Penelitian
Balai yang ditampal dalam Berita
Acara/Nota Penelitian Balai A atau B
yang ditampal dalam Balai
Permohonan Balai A atau B tanggal _____
Nomor _____ pemohon memperoleh
hasil surat terbitan _____
yang telah (jika) dipaparkannya
untuk _____ sesuai dengan nomor
permohonan dan pengesaran terbitan
(jika).

2. Balai permohonan surat terbit
disebut untuk diakhiri/dibekukan oleh
Kepala Balai Perikanan Kelengkapan/
Kantondya _____ dengan nomor
tanggal _____ Nomor _____

3. Balai telah secara permohonan surat terbit
untuk memperoleh surat terbit sesuai
dengan kebijakan pemohonan, maka
permohonan surat terbit dapat
dibekukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
1961
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
1961 (jika).

Lampiran I
Formulir Ibis 0116

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN NEGARA (KEMENAG)
KIPRAK BAHAS PERWAKILAN NASIONAL
NOMOR :
(MELAWAN)
PENGALAMAN :
ALAM TINGGAL DI :

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN NEGARA (KEMENAG)
KIPRAK BAHAS PERWAKILAN NASIONAL

Membawa : Surat permohonan dari tanggal
terkubandikan di Nomor Surat yang
terkubandikan dengan No

Membawa : a. Salinan permohonan, pengajuan permohonan
untuk memperoleh hak ... atau hasil
suara hasil penghitungan hak suara yang
dihasilkan dalam Surat Suara (Cedera
Suara) tanggal ... Nomor atau ...
No (.....) terdapat di Bawah (Kubandikan
..... Kecamatan Kabupaten/
Kecamatan Propinsi
b. Salinan surat hasil pemerkahan Petugas
Kecamatan Bupatir yang ditandatangani
dalam Laporan Kecamatan/Hasil Pemerkahan

Surat yang ditandatangani dalam Surat
Suara/Petrua Pemerkahan Surat a atau b
yang ditandatangani dalam Surat
Pemerkahan Surat a atau b tanggal
nomor pemerkahan memperoleh hasil
terkubandikan yang telah
pilih memperolehnya untuk
suara dengan nomor pemerkahan dan
pengumuman terdapat (aparat)

1. Salinan pemerkahan surat terdapat
dihasilkan untuk diadik/dibubuhkan oleh
Kiprak Kecamatan (Wakil Badan Perwakilan
Nasional) Propinsi dengan surat
tanggal nomor
2. Salinan hasil surat pemerkahan surat terdapat
tidak memuat surat dan tidak sesuai
dengan kebijakan Pemerkahan, maka
pemerkahan surat terdapat tidak dapat
dihasilkan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
1999
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
1999 (perubahan)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
1999
 5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1999

4. Keputusan Presiden Nomor ... Tahun ...;
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 1998;
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun ...;

REVISI/REKLAMASI:

Mengajukan
PERMILAHAN

1. Menuntut pemindahan hak
dari dalam/ke/di/kebalikan
atau bidang tanah nomor di/da/
di) terdapat di Desa/
Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya Provinsi
....., Surat Ukur/Cadangan Surat
tanggap Nomor

MERUSA

1. Apabila dikawatirkan hak tersebut terdapat
kekawatiran/kerusakan dalam pemertanannya,
keputusan ini akan ditinjau kembali
selagi persengketaan berlangsung.

MERUSA

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

BERIHAJAHAN DE :
PAWA/LOKASI DE :

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

di Padi:

REVISI/REKLAMASI Keputusan ini ditandatangani Kepala De :

1. Deputi Bidang Peta-Peta atau Wakil Badan Pertanahan
Nasional di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Regional)
..... di
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
di

Lampiran 1
Formulir IKN-011

Kepada Yth.
Bapak Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan
Nasional
di Jakarta

Kepada Kepala Perwakilan
Kebudayaan/Komunitas _____
di _____

PERM/010000/004, 002, 003
dan 004

Yang terhormat, dengan ini berakui bahwa _____ adalah
_____ adalah telah teridentifikasi secara dan atau nama
_____ dengan ini menggunakan
perencanaan: (1) MBL/ (2) Caku Ronggong/ (3) Pak Paka/ (4)
Pengalihan/ dengan menggunakan sebagai berikut:

A. IDENTIFIKASI PERENCANAAN :

1. Nama dan/atau _____
2. Nomor pengajaran _____
dan/atau _____
Berkas/ (KTP) dengan _____
atau _____
Membuat/terima _____
3. Pekerjaan/ jabatan _____
4. Tempat tinggal/ kediaman _____

5. Nomor rekening bank _____
6. Anak yang masih mendapat tanggungan _____
a. _____
b. _____
c. _____

7. Anak Pendidikan/Perawatan Balak (Balak) _____
Tgl/ Nomor Akta/ Nomor Pendidikan/ Tgl /
Nomor Keputusan Menteri Dalam-Negeri/
Kedudukan _____

B. MENGENAL PERENCANAAN :

1. Keluarga _____
a. Jalin _____
Kebudayaan/ Nama _____
Kecamatan _____
Kebupaten/ Kecamatan/ _____
Provinsi _____
2. Orang tua _____
Nama Uluh / (Gelar) Street _____
Tgl _____ Nomor _____
3. Rata-rata _____
Jenis _____
Jenis _____
Jenis _____
Rata-rata _____
4. Status Tanah _____
Balak Negeri Balak _____ /
Tgl _____, No/ tempat /

(Hal yang tidak di atas sudah) (RPP) (Kakiki) (Sera

Kemampuan (Sera

Uj) _____ (Sera

1. Jenis dan Kualitas Hasil : _____

2. Proses/Prosedur : _____

(Sera yang merupakan seluruh/kelompok
sasaran, apa adanya situasi terdapat/ ter-
masuk dalam/melampaui batasannya)

3. Rencana/Prosedurnya : _____

1) **INDUKSI LAIN (KATEGORISASI/INDUKSI)** : _____
INDUKSI : Kategori/

Kelompok/

Induksi _____

2) **Induksi** : _____

3) **Induksi** : _____

4) **Induksi** : _____

2) **INDUKSI LAIN (KATEGORISASI/INDUKSI)**

1. Cara copy RPP / Sera Baku
Kemampuan/Induksi/Sera
Baku/Induksi/Kelompok : _____

2. Cara copy atau atau prosedur
pendidikan Baku/Induksi dan
Kemampuan : terdapat/ masuk _____

3. Kemampuan, Cara, Sera Kapasitas,
Sera atau Baku/Induksi/Induksi

dan prosedur hasil dan result
yang tidak di atas dan Prosedur,
atau RPP/ atau prosedur/ atau
prosedur/ prosedur, atau cara
tidak pendidikan/Induksi

4. **Induksi** : terdapat/ masuk _____

5. **Induksi** : terdapat/ masuk _____

6. Cara copy Sera Prosedur
Induksi/Induksi dan Induksi : _____ terdapat/ masuk _____

7. Cara copy Sera/Induksi dan
Induksi/Induksi dan Induksi : terdapat/ masuk _____

8. Cara copy Sera/Induksi dan
Induksi/Induksi dan Induksi : terdapat/ masuk _____

9. Cara copy Sera/Induksi dan
Induksi/Induksi dan Induksi : terdapat/ masuk _____

10. Cara copy Sera/Induksi dan
Induksi/Induksi dan Induksi : terdapat/ masuk _____

11. Cara copy Sera/Induksi dan
Induksi/Induksi dan Induksi : terdapat/ masuk _____

12. Cara copy Sera/Induksi dan
Induksi/Induksi dan Induksi : terdapat/ masuk _____

13. Cara copy Sera/Induksi dan
Induksi/Induksi dan Induksi : terdapat/ masuk _____

14. Cara copy Sera/Induksi dan
Induksi/Induksi dan Induksi : terdapat/ masuk _____

15. Cara copy Sera/Induksi dan
Induksi/Induksi dan Induksi : terdapat/ masuk _____

16. Cara copy Sera/Induksi dan
Induksi/Induksi dan Induksi : terdapat/ masuk _____

1. Sempikan, Ciri, Surat Kapling
Surat-surat Bilik Pelapisan dan
dan pelapisan surat dan surat
yang telah dibuat dan Pemasangan,
alat PPAI, alat pelapisan dan
pemasangan pengalihan, pemasangan
bilik pelapisan lainnya
2. Salinan Surat (Uraian/Gambar Surat
1 Bilik
3. Bagaimana cara Surat Pelapisan
Bilik (Uraian/Gambar Surat)
4. Bagaimana cara Surat Pelapisan Bilik
dan Pelapisan Bilik
5. Bagaimana cara Surat Pelapisan Bilik
dan Pelapisan Bilik
6. Bagaimana cara Surat Pelapisan Bilik
dan Pelapisan Bilik
7. Bagaimana cara Surat Pelapisan Bilik
dan Pelapisan Bilik
8. Bagaimana cara Surat Pelapisan Bilik
dan Pelapisan Bilik
9. Bagaimana cara Surat Pelapisan Bilik
dan Pelapisan Bilik
10. Bagaimana cara Surat Pelapisan Bilik
dan Pelapisan Bilik
11. Bagaimana cara Surat Pelapisan Bilik
dan Pelapisan Bilik
12. Bagaimana cara Surat Pelapisan Bilik
dan Pelapisan Bilik
13. Bagaimana cara Surat Pelapisan Bilik
dan Pelapisan Bilik
14. Bagaimana cara Surat Pelapisan Bilik
dan Pelapisan Bilik

Apabila pemukiman tersebut dibudikan, pemukiman tersebut
memerlukan syarat-syarat yang telah dan akan ditunjukkan oleh
Pemerintah.

Gambar : Gambar yang telah diperbaiki _____ Uji _____
Pembahasan,

[_____]

Lampiran 1
Formulir Ikon 2018

Kepala yth,
Kepala Kantor (Kantor Agensi)
Kepala Badan Pertahanan Nasional
di Jakarta
Tg,
Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertahanan Nasional Propinsi _____
di _____

PERMINTAAN/UNDUK:

Tang beranda dengan di bawah ini _____ akan
_____ akan hal ini bertumbuh central dan akan sama
_____ dengan ini merupakan permasalahan
Pilih Cara/Urutan dengan berurutan sebagai berikut:

A. BERURUTAN DARI TERDEKAT :

1. Nama Pemohon/Badan/Orbita : _____
2. Demensi/Tempat/Kelompokan : _____
3. Nama Pemohon Badan/Orbita : _____
4. Pangkatnya/Orbita/Urutan : _____
5. NIMN : _____

B. BERURUTAN DARI TERDEKAT/TERBUKTI :

1. Urutannya : _____
 - a. Nama/Kelompokan : _____

2. Urutannya : _____
 - a. Kelengkapan/Kemutakhiran : _____
 - b. Pangkat : _____
3. Urutannya : _____
 - a. _____ IMN
Nama/Orbita/Kelompokan
Urutan
Urutannya : _____
 - b. Urutan : _____
Urutan : _____
Urutan : _____
Urutan : _____
4. Urutan Urutan : _____
5. Jenis dan Kualitas Urutan : _____
6. Dasar/Keputusan : _____
7. Rincian/Penggunaannya : _____

d. Urutan Lain yang Diperlukan/Perbaikan

- (Jelaskan secara terinci,
dan diteliti/ditanya dengan meninjau
Kelengkapan/Kemutakhiran) : _____
1. _____
 2. _____
 3. _____ dan _____

4. Nama yang sudah menjadi tanggapan : a. _____
b. _____
c. _____

5. Nama Perorangan/Perorangan Bukan-Pribadi : _____
Tgl./Nomor Aktas / Perorangan Pribadi Tgl./
Nomor Kependudukan Nomor Dalam Negeri/
Kebudayaan : _____

B. WILAYAH DAERAH DAN/ATAU DAERAH

1. Kabupaten : Nama : _____
Kebudayaan/Provinsi : _____
Kecamatan : _____
Kabupaten/Kemendagri : _____
Propinsi : _____

2. Kecamatan : Nama : _____
Kabupaten/Provinsi : _____
Tgl./Nomor : _____

3. Kecamatan : Nama : _____
Provinsi : _____
Kabupaten : _____
Kecamatan : _____

4. Kecamatan : Nama Negeri Dalam _____ /
Provinsi _____ /
(Nama yang terdapat di atas adalah (KIP) Kabupaten/Provinsi
Kabupaten/Provinsi
Tgl./Nomor : _____

5. Nama dan Kabupaten/Provinsi : _____

6. Nama/Kepulauan : _____
(Nama yang terdapat di atasnya adalah (pa-
ribatan, apa dan/atau adalah tanggapan/na-
ma dari wilayah tersebut.)

7. Kecamatan/Kepulauan : _____

8. Tanggapan/ Nama/ Kabupaten/Provinsi : _____
_____ (Kabupaten/
Provinsi) _____
(Kabupaten/Provinsi, nama dan kabupaten
dengan menuliskan Kabupaten/Kemendagri dan
provinsi) : _____ dan _____

B. WILAYAH DAERAH DAN/ATAU DAERAH

1. Nama copy KIP / Nama dalam
Kependudukan Indonesia/Nama
dalam dokumen lainnya : _____

2. Nama copy atau nama perorangan
pribadi/Perorangan Bukan-Pribadi dan
penggunaannya : tanggapan _____ nomor _____

3. Tanggapan/ Nama/ Nama Kabupaten/Provinsi
Kabupaten/Provinsi Kabupaten/Provinsi
dan kabupaten/Provinsi dan nomor
yang terdapat di atas (Nomor, atau
KIP), atau tanggapan/Provinsi,
perorangan/pribadi, kecamatan
dalam perorangan lainnya : _____

(.....) tidak dan luas kerucutnya adalah
.....

- 1) Balok PQ (Balok Halus) telah mempunyai permukaan
permuka) hasil yang diberikan. Artinya :
(.....) tidak dan luas kerucutnya adalah
.....

yang perhitungannya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai	Uraian
1
2
3

Demikian hasil pengisian ini saya buat dengan sejujurnya dan
sungguh diharapkan. Atas perhatian dan bimbingan yang telah diberikan
saya ucapkan terima kasih.

..... tanggal

(.....)

(.....)

(.....)

Lampiran I
Formulir Insang

KANTOR HIMPUNAN ANGGOTA KADIS PARIWISATA/KEKAWANAN

Surat Keterangan Kehadiran/Keabsahan/Keaktifan/Keanggotaan di Bidang
MBA :

Untuk mengisi/kehadiran permohonan Pdt atau nama :
..... yang terdapat di jalan (Desa/Kabupaten
..... Kecamatan yang terdapat di:

1. Permohonan permohonan Pdt tanggal
(yang telah diisi dan ditanda tangani pemohon)
2. Foto copy Identitas (Paspor/pas)
3. Foto copy atau buku-buku lainnya dan pengubahannya atau
Peraturan Perundang-undangan lainnya
4. Keterangan tidak pernah menikah
a. Surat Pernyataan Tidak Menikah
b. Surat Bukti Kelahiran Pdt tanggal nomor
.....
c. Akta IPAT (atau Justifikasi kelahiran/akta kelahiran/akta
MBA/ Akta Kelahiran) tanggal nomor
5. Surat pernyataan sudah dan sanggup atau sudah
a. Surat Pernyataan Pernyataan Tidak
b. Surat Pernyataan Kelahiran Menikah dan termasuk terdapat
g) dan

5. Surat surat lainnya:
 - a. Surat Pernyataan Pernyataan tanggal mengenai
pembayaran dan keanggotaan yang telah dibayar.
 - b. Surat Keterangan/Keabsahan/Keaktifan/Keanggotaan
c. Foto Copy Surat Pernyataan sebagai Bukti Kehadiran yang
diperoleh dari Pdt MBA
 - d. Surat Pernyataan Pernyataan Tidak dan
tanggal
 - e. Kelengkapan surat lain yang relevan
 - f. Surat Rekomendasi dan Rekomendasi dari Majelis
g. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal terdapat dari Majelis
..... tanggal
 - h. Ipa (Istana/STPP)
 - i. dan

di. Kepala Kantor/Perwakilan
Kebudayaan/Kemasyarakatan
Pariwisata/Kepulauan

[.....]
MBA.....

Disetujui
Garis yang tidak perlu

Lampiran
Formulir lain-lain

KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN TEGAYAN

**BIRO KECUALIAHAN PEMERINTAH TIM PENILAI
TANAH**

No.

**DIJALUKAN PERALIHAN KEPEMILIKAN TANAH DAN BUNDA
KAWASAN PERALIHAN KEPEMILIKAN PERUMAHAN
KAWASAN PERUMAHAN BERKAWASAN (KAWASAN PERUMAHAN)**

Paik (sah) no./sah tanggal bulan
tahun yang ditandatangani di bawah ini:

1. Kepala Kantor Perumahan/Kepala
Tim Penilaian Tim Penilai dan
Tim Penilai Kantor Perumahan
Kabupaten/Kotamadya sebagai
Kantor
2. Kepala Tim Penilaian dan
Perumahan Tim Penilai Kantor
Perumahan Kabupaten/Kotamadya
..... sebagai

1. Kepala Tim Penilaian Perumahan
Perumahan Tim Penilai Kantor
Perumahan Kabupaten/Kotamadya
..... sebagai
2. Kepala Tim Penilaian Perumahan Tim
Penilai Kantor Perumahan Kabupaten/
Kotamadya sebagai
3. Kepala Tim Penilaian Perumahan Tim
Penilai Kantor Perumahan Tim
Penilai Kantor Perumahan
Kabupaten/Kotamadya
sebagai

Demikianlah merupakan Tim Penilai Tim Penilai Kantor Perumahan Kabupaten/Kotamadya sebagai ditandatangani
di bawah Kantor Kepala Badan Perumahan Nasional tanggal 4 Mei
1991 Nomor 104.220 ja. Nomor Kabupaten Kepala Kantor
Perumahan tanggal Kantor
tahun telah meneliti dan yudisial dan data baik serta
dituang ke dalam bentuk yang diteliti merupakan pemukiman
untuk mengetahui ada atau tidaknya yang berkaitan dengan
kehidupan pemukiman dan

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Bertanda-tanda
dan apa nama :
- d. Bertanda-tanda di :

Formulir Isian #11

KANTOR PERUSAHAAN KARYA PABRIK/KELOMPOK

Nama dan Jabatan (Maksimal 200 Karakter)
Nama:

Pada hari ini tanggal _____, kami yang beranda
tersebut adalah ini:

1. Kepala Toko/Manajemen Programan
Makhluk atau Untuk Kantor
Perusahaan Kabupaten/Kotamadya
sebagai Kantor bertanggung jawab
2. Kepala Toko/Manajemen Programan
Manajemen/Manajemen Untuk Kantor
Perusahaan Kabupaten/Kotamadya
sebagai Wakil Kantor bertanggung
jawab
3. Kepala Toko/Manajemen Programan
Programan Untuk Kantor
Perusahaan Kabupaten/Kotamadya
sebagai anggota

4. Kepala Toko/Manajemen Programan
atau Untuk Kantor Perumahan
Kabupaten/Kotamadya sebagai
anggota
5. Kepala Toko/Manajemen Programan
atau Untuk Kantor Perumahan
Kabupaten/Kotamadya sebagai
anggota
6. Kepala Toko/Manajemen Programan
Manajemen/Manajemen Untuk Kantor
Perumahan Kabupaten/Kotamadya
sebagai Sekretaris bertanggung
jawab

yang beranda sama merupakan Panitia diundang dalam
Rapatannya Kepala Badan Perumahan Nasional Nomor 11 Tahun
1991 yang disertai orang-orang yang beranda dan (Makhluk
_____, Kawanan _____, Kabupaten/Kotamadya/Wilayah
_____) untuk datang di Kota tersebut merupakan
perwakilan, apakah ada perubahan atau tidak, sehingga
dibuatnya perundang-undangan:

- a. Nama
- b. Pekerjaan
- c. Alamat/perumahan
- d. Tempat tinggal

a. Bertanda cetak

1. Kepala Kantor Wilayah (Regional) / Kepala Kantor Perencanaan
Kepala Badan Perencanaan Kabupaten/Kotamadya
Municipal/Provinsi _____
2. NIP. _____

NIP. _____

Jenis Perencanaan :

Jenis Kepala Kantor / Kepala Badan Perencanaan / Municipal
Provinsi _____

Lampiran II
Formulir I/2018/18

**BANKOH MELAKUKI BUKTIAN PERSYARATAN NASIONAL
PESIKUSI**

DEKLARASI PUNYA KEWAJIBAN NASIONAL

(Nama):

Pada hari ini tanggal, kami yang beranda
tersebut dibawah ini:

1. Kepala Kantor Wilayah Badan
Perencanaan Nasional Provinsi
....., selaku Ketua
menyampaikan sebagai)
2. Kepala Bidang Pengembangan
Lisensi Kantor Wilayah Badan
Perencanaan Nasional Provinsi
....., selaku anggota)
3. Kepala Bidang Hak-Hak atas
Tanah Kantor Wilayah Badan
Perencanaan Nasional Provinsi
....., selaku anggota)

4. Kepala Kantor Daerah Tingkat II
atau Pejabat yang ditunjuk
....., selaku anggota)
5. Kepala Dinas Perkebunan/
Perikanan/Peternakan/ Pertanian
Daerah Tingkat I, selaku
anggota)
6. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Kehutanan Provinsi
....., selaku anggota
(jika memang tanah yang dituntut
tersebut kawasan hutan atau
yang berkaitan dengan kawasan
hutan)
7. Pejabat lain selaku
anggota)
8. Kepala Kantor Perumahan
Kebudayaan/Keternakdya
selaku anggota)
9. Kepala Seksi Pengawasan Hak
Tanah Pengawasan atau Kepala
Seksi Pengawasan Hak Tanah
Badan Wilayah pada Kantor
Wilayah Badan Perencanaan
Nasional Provinsi

nama kabupaten, tanggal
tanggal)

Yang bersama-sama menyetujui Panitia diundang dalam
keputusan Majelis Badan Pertahanan Nasional Nomor 14 Tahun
1960 untuk mengabdikan/pemeriksaan apakah ada kabupaten atau
kota sebagai berikut tanpa pemukiman dari :

- a. Nama : _____
- b. Pekerjaan : _____
- c. Alamat/pengantar : _____
- d. Tempat tanggal : _____
- e. Bertindak untuk
dan atas nama : _____
- f. Tempat/kebiasaan : _____
- g. Nama panggilan : _____
nama panggilan : _____
nama panggilan : _____
nama : _____

Untuk memperoleh Hal-Cara Daftar atau surat yang
terdapat di atas: --- Kecamatan _____ Kabupaten/
Kotamadya _____, atau _____ Hal-hal yang diketahui
dalam jumlah atau/pada atau/atau atau tanggal _____
nama _____

a. DAFTAR DAN DAFTAR

- 1.
- 2.
3. dan

B. DAFTAR/DAFTAR

- 1.
- 2.
3. dan

C. KEPENGINGINAN, DAFTAR, LAIN, DAN KEPENGINGINAN
DAFTAR

- 1.
- 2.
3. dan

B. KEPENGINGINAN, DAFTAR, DAFTAR, KEPENGINGINAN
KEPENGINGINAN, DAFTAR, KEPENGINGINAN

1. bahwa di atas surat yang ditandatangani oleh/tidak ada
pengantar yang ada, atau (14/16)
2. bahwa pengantar tersebut terdapat terdapat

3. bahwa pengantar/pada pengantar tersebut/tidak terdapat
terdapat
4. bahwa pengantar tersebut ditandatangani/tidak ditandatangani
pengantar/pengantar terdapat
5. bahwa pada pengantar tersebut terdapat/tidak terdapat
dengan atau/tidak atau pada pengantar/ tanggal dalam
nama _____
6. bahwa pada pengantar tersebut/tidak terdapat
melainkan pengantar-pengantar

B. KEPENGINGINAN, DAFTAR, DAFTAR, DAFTAR, DAFTAR

- 1.
- 2.
3. dan

2. SIKAP/TAJUK

- a.
- b.
- c. dan

3. MAKNA/PEMBERIAN HASIL/TERBUKTI

- i.
- ii.
- iii.
- iv.
- v. dan

Lampiran ini
diperoleh dari a.

**KANTOR MELAKUKAN ANALISIS PERENCANAAN NASIONAL
(PENCANA)** _____

**Bentuk Perencanaan Tahun
(Konsensus Support)**

No. _____

Pada hari ini bertanggal _____ bulan _____ tahun _____, yang bertempat tanggal di bawah ini _____, yang pertama yang diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Perencanaan Nasional Provinsi _____ Kabupaten Perencanaan Wilayah Negeri sebagai Kepala Badan Perencanaan Nasional Negeri _____ telah meneliti dan peroleh dan data baik secara langsung ke dalam bentuk yang diarahkan menggunakan pemeliharaan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan dan:

- a. Nama _____
- b. Umur _____
- c. Pekerjaan _____
- d. Keanggotaan _____
- e. Tempat tinggal _____

1. Bertindak untuk /
atau nama Badan Usaha :
2. Bertindak di :
3. atau tindakan :
- Tanggal Nomor

Utang merupakan
penggunaan/pembiayaan/pembayaran/ pemindahan Hak
Cerah/Budaya yang terdapat di :

Jenis
Tipe/Keberatan
Kawasan
Kelembagaan/Kemampuan
Pengaruh
Tanggal dan No. SK/CM, dan Tanggal Nomor
atau dan

Tanggal hasil pemindahan sebagai berikut :

1. Nama Tanah :
(Lihat rencana : Hak SHM, Hak Pakai atau Hak SHM, Hak Pakai atau Tanah Negara)
2. Badan/Batas yang ada di atas Tanah :
(Silahkan urutkan : Hak Tanggungan, Sisa/Jumlah, Eksistensi
Pengalihan, dll)

3. Kegiatan Pengurusan dan Penggunaan Tanah :
(Lihat rencana pengurusan, jika tidak lain adalah
kegiatan lainnya dengan pemohon, dan rencana penggunaan
tanahnya : usaha, hobby, lahan, lahan lain,
perumahan, usaha, perkebunan, usaha pengembang,
kegiatan umum, ulah/kegiatan lain (jika ada)/Penggunaan
lainnya)

4. Badan/Batas Persewaan dan Persewaan Tanah :
(Lihat : Sengketa, Waras, Hibah, Persewaan, Pledge,
Persewaan, dll)

5. Lain-lain :
(jika ada agar diuraikan)

6. Kesimpulan :
 - a. Bahwa pemindahan Hak melalui HakPAJ
DILAKUKAN/LEWAH HakPAJ DILAKUKAN dengan
dasar HUKUM PERTANAHAN NEGARA/HUKUM
PERTANAHAN NEGARA atau HUKUM atau
KEBIJAKAN/ALAM KEBIJAKAN yang diterima dan
tersebut pemohon/HASIL atau/HASIL atau yang terdapat
atas tanah yang dimaksudkan
 - b. Bahwa juga dasar tanah untuk tiap haknya adalah
sesuai No.
sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1991 jo Nomor 1
Tahun 1990

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkai (.....) untuk dipergunakan sebagaimana tertera.

Ruang Pemeriksaan)

Nama:

Mengetahui
Kepala Kantor Wilayah Badan Perencanaan Nasional
Pangkal
.....

Catatan:

1. Lembar yang tidak perlu.
2. Bila Kepala Kantor Wilayah mempunyai pemeriksaan, agar diuraikan pada lembar rangkai.

Lampiran 07
Formulir Lembar 001-A

PERANGKATAN (PA) /Koran
Lembar atau Lembar Koran
Rangkai

Kepala Ibt.
Rptl - Kepala Kantor Perencanaan
Nasional/Korantanya
di

Yang terhormat rangkai di bawah inidiingat
.....diingat hal ini berkaitan dengan data atau nama
.....diingat Rangkai ini merupakan
pemeriksaan. Hal ini PA (Koran Koran) yang sudah selesai sudah
Rangkai Rangkai koran sebagai berikut:

a. REKAPITULASI DATA (REKAPITULASI) :

1. Nama dan Uraian :
2. Kewenangan/urusan : dan/atau
Nama Perseorangan (PIB) rangkai
.....diingat hal ini termasuk
.....diingat :
3. Pekerjaan /jabatan :
4. Tempat (tanggal) kelahiran :
5. Nomor kelahiran :
6. Anak yang sudah meninggal/rangkai: a.
b.
c.

B. MEMBUKTIKAN TERDAPATNYA CATION/ANION

a. **Kation** : **OH⁻ / NH₄⁺**
Bahan: **OH⁻ / NH₄⁺**
Reaksi: **OH⁻ / NH₄⁺**
Bahan: **OH⁻ / NH₄⁺**
.....

b. **Sangat Larut / Garam Garam** : **Tipe** **Warna**

c. **Urat** : **Warna**

d. **Endapan** : **Warna**
Kelambatan / Warna
Kerapatan
Kelengkapan / Ketamamannya
Preparasi

e. **Bariumium** : **Warna**
Warna
Warna
Warna

f. **Strontium** : **Warna**
Warna

g. **Bariumium** :
(Agar supaya diketahui pemisahan, akan
diperagakan kembali ke dalam pemisahan
pemisahan.)

d. **Tersebut ada yang CATION/ANION** :
Warna :

(Jelaskan secara rinci, bagaimana halnya
dengan memisalkan Kelengkapan / Ketamamannya
saya) :

B. MEMBUKTIKAN TERDAPATNYA ANION

1. **Urat** : **Warna**
Warna
Warna

2. **Warna** : **Warna**
Warna

3. **Warna** : **Warna**
Warna
Warna

4. **Warna** : **Warna**
Warna

5. **Warna** : **Warna**
Warna
Warna

Lampiran IV
Formulir 04/01/04

KANTOR PRIBADI KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN KEMAHENDIKAN

DAFTAR TERMAHENDAH PERMUTUHAN
REVISI: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

No.
(Reg. Min. / No. BPN No. 1 Tahun 1998)

Tidak terima daftar permohonan Revisi MBIK no.
yang terdapat di jalan (Desa/Kabupaten/?)
Kecamatan yang terdiri dari:

1. Nomor permohonan Revisi tanggal
yang telah diterima dan ditanda tangani pemerintah
2. Kota/Desa/Kelurahan
3. Nomor Revisi MBIK/Desa/Kelurahan/.....
4. Kota/Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota/Desa/Kelurahan
lainnya (terutama kecamatan/kelurahan/kota/kabupaten/kota/kabupaten
lainnya yang berbatasan dengan daerah yang bersangkutan?)
5. Kota/Desa/Kelurahan - PBB Tahun (Jumlah tanah Ha)
6. Nama Pemohon dan pemohon: (jumlah orang dan nomor tanah yang telah dimiliki tanggal

no. Kepala Kantor Persewaan
Kebudayaan/Kemahendikan/?)
Tanggal/Tanda Tangan

.....
TAMBAH

Catatan:
*) Cetak yang tidak perlu

Lampiran III
Formulir Pendaftaran

KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN KULON KALINGGING, KOTA GARUT, JAWA BARU

Kepala Yth,
Nama : _____
Lampiran : _____
Perihal : Pendaftaran
perguruan tinggi
perguruan

1. Sehubungan dengan permohonan pendaftaran (Matrikulasi) yang berisikan aplikasi atau surat yang terlampir di :

Jalan : _____
Kebudayaan (Desa) : _____
Kecamatan : _____
Kabupaten/Kota : _____
(yang berlatarbelakangi) : Matrikulasi (Matrikulasi) _____
No. _____
Tgl. _____
Tanda Tangan _____

2. Dengan ini diberitahukan bahwa untuk pendaftaran (Matrikulasi) dimaksudkan kepada Sekolah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten/Kota yang dituju oleh Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota/Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan/Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Desa/Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan/Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan RW/Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan RT yang bersangkutan yang dituju oleh

tersebut (Matrikulasi) sebagai berikut : _____
tersebut (Matrikulasi) yang dituju oleh Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota/Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan/Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Desa/Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan/Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan RW/Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan RT yang bersangkutan yang dituju oleh

1. Apabila dapat diterima atau tidak permohonan tersebut di atas maka akan diberikan pertimbangan tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. *)
2. Demikian disampaikan untuk dipertimbangkan.

Kepala Kantor Pendidikan
Kabupaten/Kota/Kecamatan : _____

NIP. _____

Dibuat dan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Kecamatan/Badan Pemerintahan Kecamatan (Kecamatan)
2. Kepala Kantor Wilayah/Badan Pemerintahan Kecamatan (Kecamatan)
3. Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota/Kecamatan _____

Catatan :

- *) : Cara yang tidak perlu.

*) Apabila yang pemohon (P) dan (G) adalah Rp. 10 (10 rupiah) dan pemohonnya pada angka tidak terdapat

b. _____

c. _____

Lampiran 01
Formulir 01/0001/01

PERMINTAAN/UNDANG (Nama) Kepala Desa
Desa/ Kecamatan dan Kecamatan
Kabupaten/Kota/Kabupaten
Provinsi dan Provinsi

Kepala Desa
Rp.10 (Sepuluh Ratus Rupiah)
Kabupaten/Kota/Kabupaten
di _____

Yang terhormat dengan di bawah ini _____ adalah
_____ adalah hal ini bertanda resmi dan ada nama
_____ dengan ini merupakan
pernyataan. Hal ini (Nama/Desa/ Kecamatan dan Kecamatan) dan terdapat nama resmi
tanggal yang tidak ada hal dan Provinsi dengan ketetapan
sebagaimana

A. IDENTIFIKASI PERMINTAAN

1. Nama dan/atau _____
2. Bulan, tanggal dan No. _____
PNS, SN, Pustak,
3. Kabupaten/Kota/Kabupaten _____
4. Kecamatan/Kota/Kabupaten _____
5. Kecamatan/Kota/Kabupaten _____
6. Tanggal yang sudah menjadi tanggapan _____

B. IDENTIFIKASI TANDA PENGESAHAN

1. Nama/nya _____ / No. Pribadi/No. _____ /
Bulan _____ /
Tanggal tanggal di
2. Nama/nya / Gambar/nya: Tgl _____ Nomor _____
3. Nama _____ /
No. _____
4. Tanggal _____ /
Bulan _____ /
Kecamatan/Kota/Kabupaten _____ /
Provinsi _____ /
Kabupaten/Kota/Kabupaten _____ /
Provinsi _____
5. Nama/nya _____ /
Desa _____ /
Kecamatan _____ /
Kabupaten _____ /
Provinsi _____
6. Tanggal _____ /
Provinsi _____ /
Kabupaten/Kota/Kabupaten _____ /
Provinsi _____
(Nama/nya/ Kecamatan/ Kota/Kabupaten/ dan
Provinsi yang tidak ada dan Provinsi dengan ketetapan
pernyataan)

11. **Sebutlah 1 unit yang merupakan satuan**
dasar.
- Pilihlah satu rumus, luas dan keliling
dengan menerapkan Kelengkapan Ketertarikan (yang
ada)
1. _____
Kelengkapan/
Kelipatan _____
2. _____
3. _____
4. _____ dan _____

apabila permasalahan tersebut dituliskan, pemilih tersebut
memilih rumus-rumus yang lebih dan akan dituliskan oleh
Pemerintah.

Contoh : Garis yang lebih pendek _____ kali _____
Pemerintah.

12. **SEBUTLAH 1 LANGKAH LANGKAH**

1. Apa saja hasil ukuran / UK
PNS, UK, Pemas, Kelengkapan,
Kelengkapan Pemas? 1. _____
2. Kemungkinan Terjadi (tidak ada) 1. _____
3. Saat Hasil Pemasaran Hasil dan
Terjadi atau tidak dari ukuran
yang kelengkapan 1. _____
4. Saat Hasil dan Internal yang
kelengkapan bahwa sudah terdapat
sudah merupakan hasil pemilih 1. _____
5. Saat Kelengkapan baik atau tidak
dari ukuran yang kelengkapan
kepada pemilih 1. _____
6. Saat Kelengkapan mengenai
jumlah hasil yang terdapat, luas dan
luas kelengkapan yang diperoleh
pemilih 1. _____

{—————}

d) Nama pengirim baik atas surat dari instansi
tanggal tahun

4. Bersebutlah lain:

a. Nama perusahaan dari perusahaan mengenai jumlah barang
luas dan status surat yang telah diterima tanggal
.....

b.

c. dan

cc. Kepala Kantor Persebaran
Kategori/Kategori
Pelayanan Yang Mendukung

[.....]
JEP

Catatan:

*Jenis yang tidak perlu

Lampiran 4
Formulir (sisa 4)

KANTOR PERSEBARAN KARTU PALSU/REPUBLIKA
.....

KANTOR KEPALA KANTOR PERSEBARAN
KARTU PALSU/REPUBLIKA

NAMA :
(.....)

KEMENTERIAN PERBURUHAN, TENAGA KERJA DAN
KAWASAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KANTOR PERSEBARAN KARTU PALSU/REPUBLIKA
PERSEBARAN

KEPALA KANTOR PERSEBARAN
KARTU PALSU/REPUBLIKA

Melampirkan : a. Salinan fotokopian dokumen/dokumen
yang telah diserahkan kepada Kantor
Persebaran surat tersebut di:

Nama/Kelembagaan :

Kategori

Kategori/Kategori

alamat : (di) surat persegel
yang telah ditandatangani dan:

Nama :

Pelengkapan :

Tanggal tanggal :

- b. Isilah dengan Keputusan / Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang
tentu sesuai berkaitan dengan Pokj BKK
kepada yang bersangkutan)
- c. Isilah untuk melaksanakan perintah
tentu sesuai pada pengalihan
keputusan mengenai/pembuatan Pokj BKK
sebagaimana dimaksud/pada huruf b.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1961
3. Keputusan Presiden Nomor Tahun
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1961.
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun

DITUBU/DEKAS :

Mengetahui
pencapaian

1. Mengetahui/pencapaian pembuatan Pokj BKK dan
tentu sesuai di
Dany/Kelembaan :
- Kesatuan :

Kelompok/Kelompok :

nama :

... (saya setuju) sebagaimana ditentukan
dalam surat (lihat tanggal) Nomor
..... atau surat :

Nama :

Tanggal Lahir :

Pelajaran :

Tempat tinggal :

Isilah : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada waktu
diundangkan

DITUBU/DEKAS :
DITUBU/DEKAS :

.....
MENTERI NEGARA PERTANAHAN
Kelompok/Kelompok :

.....
DITUBU/DEKAS :

DITUBU/DEKAS dan/atau kepada Pokj BKK :

1. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN (kepada/keputusan)
2. Badan BPN
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi
4. Yang bersangkutan

Lampiran 01
Formulir Pendaftaran

PENYALAHKAN HAK

Kepada Yth.
Bpk. Kepala Kantor/Pimpinan
Kebudayaan/Keramatnya

di _____

Yang terhormat, dengan ini berakadib _____ akan
_____ akan hal ini berakadib, untuk dan atas nama
_____*) dengan ini menyerahkan
pernyataan pendaftaran (baik _____ maupun _____ dengan
kemungkinan sebagai berikut:

A. INFORMASIONAL (TANPA PERAKADIB) :

1. Nama dan Gelar/Nama Perseorangan : _____
2. Nomor pengantar data (atau Kartu Pendaftaran
(K/P) dengan nomor induk administrasi keluarga) : _____
3. Pekerjaan, jabatan : _____
4. Tempat tinggal/ kediaman : _____
5. Nama Pendidikan/Perseorangan Baik/Bekas : _____
Tgl./Nomor Akadib/ Perseorangan Pendidikan Tgl./
Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri/
Kediaman : _____

B. INFORMASIONAL TERAKADIB (TANPA PERAKADIB) :

1. Nomor pengantar data : File BKK No. _____ / _____
BKK No. _____ / _____
Buku File BKK No. Akadib _____
2. Nama Orang/Canda/Orang : Tgl. _____ No. _____
3. Umur : _____ thn
4. Pendidikan : Islam _____
 Katolik _____
 Hindu _____
 Bani/Wedha _____
 Prig. _____
5. Nama Istri : Ganda _____
 Tidak _____
 Ganda _____
 Tidak _____
6. Jenis Tanah (Perseorangan/ non Perseorangan) : _____
7. Dasar Pengantarannya : _____
(Pengantar baik oleh sendiri, Akadib (PWA), Kelong,
Pekerjaan (baik, dll)
8. Pengantarannya (perseorangan, diakadib perseorangan dan non
diakadib perseorangan) oleh pribadi dan non perseorangan perseorangan
: _____
9. Nomor pengantarannya : _____

Lampiran II
Formulir 02/01/2014

BUNDAH PERALIHAN KAWAN/TAJUK/UMUM

BUNDAH PERALIHAN/BUKTI PEMERINTAHAN/PERALIHAN TAJUK

No.

(Kag./MKA/ta. NPA Nomor 01 Tahun 1997)

Tidak terima bersetujuan pemindahan peralihan Tajuk
mempunyai Tajuk dan nama yang terdapat di
jilid dan (Kategori *) dan kemudian
..... yang terdiri dari:

1. Formula pemindahan peralihan Tajuk tunggal (yang
tidak ada dan double tunggal pemaham)
2. Satu copy ilintasi (Penerangan)
3. Satu copy buku-buku lain dan pengubahannya atau Perincian
Perincian buku-buku.
4. Senarai/ta. peralihan terah:
 - a. Kumpulan (Majlis/Ch/DP/PAK/MA/ Jaka Nama
Tawar amaran)
 - b. Kumpulan (Majlis/Ch/DP/PAK/MA/ Jaka Nama
Tawar amaran)

5. Satu Nota lain:

- a. Perincian dari Penerima (Majlis/Ch/DP/PAK/MA/ Jaka Nama
Tawar amaran)
- b. Satu Kumpulan dari peralihan tunggal
mengapa peralihan bulat dan lain yang tidak dimilik
- c.
- d. dan

sa, Kepala Kerja Pemindahan
Kategori/Umum/ta
Penerangan/Umum/ta

.....
NPA.....

Contoh :

*) Contoh yang tidak perlu

Lampiran 01
Formulir 0100-0111

KONTRAKSI KAWANAN KAWANAN (KAWANAN) KAWANAN

Nama : _____ Kapala/Dir. _____
Lampiran : _____ Dir. _____
Perihal : Fasilitas/Barang Peralatan _____
Bayar Perumahan _____
Perumahan/Dir. _____

1. Sehubungan dengan pemukiman perumahan Dir. _____
mempunyai Dir. _____ (yang sudah ada atau tidak, yang
terdapat di:

Dir. _____
Kawanan _____

dirinya akan diadakan dalam bentuk perumahan ini diwujudkan,
kapala sudah siap untuk menerima yang pemukiman kapala
dengan dengan pemukiman sebagai berikut :

a. Diberikan pada Dir. _____

b. Diberikan pada Dir. _____ (Kapala/Dir.)
Kawanan _____

a. Diberikan pada Dir. _____

b. Diberikan pada Dir. _____ (Kapala/Dir.)
Kawanan _____

c. Apabila sampai sekarang belum ada pemukiman perumahan
diberikan, maka akan diadakan pemukiman kembali sesuai
kemungkinan yang terdapat.

d. Diberikan dan apabila akan diadakan pemukiman.

KAWANAN KAWANAN (KAWANAN)
KAWANAN KAWANAN

Dir. _____

Kawanan

_____ (Nama yang tidak perlu)

Lampiran 10
Formulir 1000/101

KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGGAPURAJAYA

**BAHAGIA PERMILIKAN DAN PERALIHAN
MILIKI TANAH DAN BANGUNAN**

No.

Tidak terdapat bukti pemindahan Pendaftaran Tanah
atau nama yang terdapat di (lihat
Daftar/Rekening *) Kecamatan yang
terdapat di:

1. Nomor pemindahan pendaftaran tanah (yang tidak
ada dan diminta supaya tidak pemindah)
2. Nama-cara selanjutnya (Hukumnya)
3. Nama-cara atau Badan Hukum dan pengirimannya atau
Penerimaan Pendaftaran Badan Hukum
4. Kecamatan tidak pemindahan tanah:
 - a. Terdaftar tanah Nomor Kecamatan atau nama
.....
 - b. Nama Kabupaten tanggal
Nama
 - c. dit

5. Nama-cara selanjutnya :

- a.
- b.
- c. dit

an. Kepala Kantor Pendaftaran
Kebudayaan/Keramatnya
Pangreh Yang Mentera,

(.....)
NIP.

Catatan :

* Cara yang tidak perlu

Lampiran III
Formulir Bina-AMN

KANTOR/INSTITUSI/LEMBAGA/PERUSAHAAN/KELOMPOK/ORGANISASI

Nama : **Kepala Unit**
Pejabat : **Agk. Kepala Kantor Wilayah**
..... **Badan Perencanaan Nasional**
..... **Propinsi**
..... **di**

Daftar Isi - PENCANTUMAN

Urutan	Keterangan/Isi	Urutan	Keterangan/Isi/Perincian
1.	1.1. 1.2. 1.3.		1.1. 1.2. 1.3.
2.	2.1. 2.2.		2.1.
3.	3.1. 3.2.		
4.	4.1. 4.2.		
5.	5.1. 5.2.		
6.	6.1. 6.2.		
7.	7.1. 7.2.		
8.	8.1. 8.2.		
9.	9.1. 9.2.		
10.	10.1. 10.2.		
11.	11.1. 11.2.		
12.	12.1. 12.2.		
13.	13.1. 13.2.		
14.	14.1. 14.2.		
15.	15.1. 15.2.		
16.	16.1. 16.2.		
17.	17.1. 17.2.		
18.	18.1. 18.2.		
19.	19.1. 19.2.		
20.	20.1. 20.2.		
21.	21.1. 21.2.		
22.	22.1. 22.2.		
23.	23.1. 23.2.		
24.	24.1. 24.2.		
25.	25.1. 25.2.		
26.	26.1. 26.2.		
27.	27.1. 27.2.		
28.	28.1. 28.2.		
29.	29.1. 29.2.		
30.	30.1. 30.2.		
31.	31.1. 31.2.		
32.	32.1. 32.2.		
33.	33.1. 33.2.		
34.	34.1. 34.2.		
35.	35.1. 35.2.		
36.	36.1. 36.2.		
37.	37.1. 37.2.		
38.	38.1. 38.2.		
39.	39.1. 39.2.		
40.	40.1. 40.2.		
41.	41.1. 41.2.		
42.	42.1. 42.2.		
43.	43.1. 43.2.		
44.	44.1. 44.2.		
45.	45.1. 45.2.		
46.	46.1. 46.2.		
47.	47.1. 47.2.		
48.	48.1. 48.2.		
49.	49.1. 49.2.		
50.	50.1. 50.2.		
51.	51.1. 51.2.		
52.	52.1. 52.2.		
53.	53.1. 53.2.		
54.	54.1. 54.2.		
55.	55.1. 55.2.		
56.	56.1. 56.2.		
57.	57.1. 57.2.		
58.	58.1. 58.2.		
59.	59.1. 59.2.		
60.	60.1. 60.2.		
61.	61.1. 61.2.		
62.	62.1. 62.2.		
63.	63.1. 63.2.		
64.	64.1. 64.2.		
65.	65.1. 65.2.		
66.	66.1. 66.2.		
67.	67.1. 67.2.		
68.	68.1. 68.2.		
69.	69.1. 69.2.		
70.	70.1. 70.2.		
71.	71.1. 71.2.		
72.	72.1. 72.2.		
73.	73.1. 73.2.		
74.	74.1. 74.2.		
75.	75.1. 75.2.		
76.	76.1. 76.2.		
77.	77.1. 77.2.		
78.	78.1. 78.2.		
79.	79.1. 79.2.		
80.	80.1. 80.2.		
81.	81.1. 81.2.		
82.	82.1. 82.2.		
83.	83.1. 83.2.		
84.	84.1. 84.2.		
85.	85.1. 85.2.		
86.	86.1. 86.2.		
87.	87.1. 87.2.		
88.	88.1. 88.2.		
89.	89.1. 89.2.		
90.	90.1. 90.2.		
91.	91.1. 91.2.		
92.	92.1. 92.2.		
93.	93.1. 93.2.		
94.	94.1. 94.2.		
95.	95.1. 95.2.		
96.	96.1. 96.2.		
97.	97.1. 97.2.		
98.	98.1. 98.2.		
99.	99.1. 99.2.		
100.	100.1. 100.2.		

Terbilang:

1. Agk. Kantor Wilayah - Agk. / Kepala Kantor Perencanaan
Kantor (Badan Perencanaan Kabupaten/Kotamadya
Nasional) Jakarta
2. Agk.

.....
GMP.....

Contoh Pencantuman:

.....
Agk. Kepala Kantor Wilayah-Badan Perencanaan Nasional
Propinsi

Formulir lain-III a

LEMBAR PERNYATAAN/TAHAP 1 (LAWYER'S OATH EXPLANATION)
PERAWAN

Yang beranda tertera di bawah ini :

Nama : _____
Jenis : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____

Berikutlah Surat Ikrar sebagai _____ Nomor _____ dalam
hal-hal tersebut untuk dan atas nama perawat:

Nama : _____
(Penerang atau Pihak)
Pekerjaan : _____
(Jika penerang)
Alamat/beralamatkan di : _____

Yang ini saya akui sebagai berikut:

1. Bahwa saya, _____, laki-laki dan anak-anak yang sudah menjadi
tergugat saya telah mempunyai tanah-tanah persami
tanah (yang diwariskan) sebanyak _____
_____ [_____] bidang dan luas luasnya adalah
_____ kali _____.

2. Bahwa PK (Badan Hukum) telah mempunyai tanah-tanah
(persami) tanah (yang diwariskan) sebanyak _____
_____ [_____] bidang dan luas luasnya adalah
_____ kali _____.

yang pertamanya terdapat di:

No	Luas Tanah	Luas Tanah	Luas Tanah

Pengakuan ini dibuat baik dalam rangka peradilan, ya
mengakui hal atas tanah-hal _____.

Berikutlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan
sungguh ikhlas. Apabila Pengadilan mengetahui bahwa saya tidak ikhlas,
berdasarkan apa ini tidak benar.

_____ tanggal _____
Materai

Materai
[_____]
Nama [_____]

Lampiran 14
Formulir lain-III g

PERALANGAN
PERALIHAN

KIPada, Yth
Kepala Kantor Negeri Agraria/
Kepala Badan Perumahan Nasional
di alamat
Tg. Kepala Kantor Wilayah
Badan Perumahan Nasional
Pangreh
melalui
Kepala Kantor Perumahan
Kebudayaan/Kemasyarakatan
di

Yang terhormat, dengan ini berakadiah bahwaalamat
.....alamat telah terburuklah secara dan atas nama
....., dengan ini mengajukan
permohonan ini peralihan hak dengan ketentuan
sebagai berikut:

A. MENGENAL DARI DOKUMEN :

- Nama dan Jenis :
- Kewenangan dan/atau :
- Nama Pemilik (KIP) :
- status saat ini :
- dan Kepala Desa/ Ketua :
- Wakil/ Kepala :
- Tempat Tanggal/Peralihan :
- Nomor Akte/Kontrak :
- Anda yang menjadi : di

tanggal : di

B. MENGENAL TUNJUK HAK/ OBJEKNYA :

- 1. Luasnya : Jalan :
- Kebudayaan/Desa :
- Kawasan :
- Kebudayaan/Kemasyarakatan :
- Pangreh :
- 2. Luasnya :
- Nama Jalan / Gambar Simbol :
- Tgl. : Nomor :
- 3. Status tanah : Liris :
- Simak :
- Sekolah :
- Buat :
- 4. Status Tanah :
- 5. Jenis dan Kualitas Tanah :
- 6. Dasar Pengakuan :
- 7. Pengembangannya :

C. DOKUMEN HAK/ HAK DIPUNJUK : di

KARANGAN BERGAMBARAN KAWALAN HIGIENIS MAMBAWA

**KARANGAN BERGAMBARAN PERSEKITARAN LINGKUNG PERALIHAN
(MAMBAWA)**

Isi _____

Tidak semua bentuk persekitaran Peralihan (MAMBAWA) _____, atau nama _____, yang terlibat di dalam _____ (MAMBAWA) _____, Karaman _____, yang terlibat di:

1. Karaman persekitaran peralihan (MAMBAWA) _____ (yang terlibat atau tidak terlibat dengan persekitaran)
2. Karaman persekitaran (MAMBAWA)
3. Karaman persekitaran Peralihan (MAMBAWA) dan persekitarannya atau Persekitaran Peralihan (MAMBAWA)
4. Karaman persekitaran peralihan (MAMBAWA):
 - a. Karaman (MAMBAWA) _____ Karaman _____ Karaman atau nama _____
 - b. _____
 - c. _____ dan
5. Karaman persekitaran:
 - a. Karaman persekitaran Peralihan (MAMBAWA) yang terlibat dengan persekitaran (MAMBAWA) _____ yang terlibat di dalam _____
 - b. _____
 - c. _____ dan

an. Karaman persekitaran Peralihan (MAMBAWA) _____
Karaman _____
Karaman _____

(_____)
dan _____

Karaman _____
Karaman _____

Karaman _____
Karaman _____

4. Bermediasi (bila digunakan untuk menulis :
(Jelaskan menggunakan model yang akan model tersebut,
dll).

5. dan seterusnya yang dianggap penting -----

Demikian surat pengantar ini saya buat dengan sejujurnya dan
sungguh diharapkan dari terjemah ada yang tidak sesuai,
apabila ada yang perlu ditanggapi untuk saya sebagai penelaah.

Teknologi :

Tanggal :

Pencetus,

Nama: _____

Alamat: _____

No. _____

Pencetakan terakhir dalam CD/DVD/CDROM dengan
sistem bahasa (jika terjemah menggunakan bahasa lain) angka 1,
2, 3, 4 dan 5 tersebut dalam tidak benar, maka ini ini menjadi
batal dengan sendirinya dengan tidak mengesampingkan
dibawahnya nama-nama Penerima sebagai Pencetus.

Terbilang di :

Langkah 01
Formulir Surat 01/12

Tanggal :
Batas, Bulan 01/12, 01/12, 01/12

SURAT PENYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Alamat : _____
Pekerjaan : _____

Enggan ini menyatakan bahwa sudah yang telah di (Jalan _____ Desa/Kelurahan _____ Kecamatan _____ Kabupaten/Kemudanya _____, Provinsi _____) atau _____ MI yang telah diberikan oleh _____ berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik/Kepala Badan Pertanahan Nasional/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/ Provinsi _____/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kemudanya _____ tempat saat ini secara legal sudah benar-benar dan hingga saat ini tidak ada sengketa/ permasalahan dengan pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Yang Menandatangani

(-----)

Lampiran 01
Formulir Istim-001A

KIPKOL/ YBL

1. Kepala Kantor/ Kepala Agensi/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/ Provinsi _____ di _____
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kemudanya _____ di _____

PERMINTAAN
PERPINDAHAN
PINDHAYATAN LP

Yang bertanda tangan di bawah ini _____alamat _____kelurahan _____kecamatan _____desa _____atau nama _____) dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan pemukiman yang pemukiman atau Kabupaten _____ tanggal _____ Nomor _____ dengan demikian sebagai berikut:

A. MENJENJAL (DIBERIKAN) :

Nama dan Alamat : _____
 Nomor pengisian di atas : _____
 Nama Pembeli (KIP) : _____
 alasan surat keterangan : _____
 dari Kepala Desa/Desa : _____
 Kecamatan : _____
 Tanggal Pengambilan : _____
 Nomor Urut : _____
 Anak yang sudah : a. _____
 meninggal : b. _____
 c. _____

2. IDENTICAL DECLARATION STATEMENT

Membaca : Jalan : _____
 Kecamatan/Desa : _____
 Kecamatan : _____
 Kabupaten/Kemudanya : _____
 Propinsi : _____

Luasnya : _____ m²
 Nomor (dan / dan dan dan) : _____
 Uraian : _____

Batas-batas : Utara : _____
 Selatan : _____
 Timur : _____
 Barat : _____

1. Tanggal dan Nomor Keputusan : _____
 Pembelian ini : _____
 2. Alasan Pembelian/Perjanjian (jika) : _____
 Waktu Pembayaran/ Uang Pemakaian : _____

C. TERDAFTAR YANG MELAMPIRAK

1. Foto Copy Surat Keputusan Pembelian Plot Tanggal : _____
 Nomor : _____
 2. Surat Alasan pembelian/ perjanjian (jika) waktu
 pembayaran uang pemakaian

Apabila pembelian tersebut dilakukan, pemohon bersedia memenuh syarat-syarat yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah.

Contoh : _____ Uraian _____
 Contoh yang tidak perlu Pembelian _____

a) ditandatangani dengan pejabat yang berwenang - yaitu Kepala/KEPMI dan Kepala Desa
 b) tidak pemohon bertanda dan nama
 (_____)

Langkah 21
 Formulasi Surat 21 a

KANTON PERINGINAN KABUPATEN, NAGARA PASIA

KAPITULAN KANTON PERINGINAN
KABUPATEN, NAGARA PASIA

SIKORU

IBRAHIM

PERIBUHAN PERINGINAN (KANTON PERINGINAN)
PEMBUKUAN DAN PERUBAHAN DAN PERUBAHAN
DAN ATAS KANTON PERINGINAN KABUPATEN
KABUPATEN, NAGARA PASIA

IBRAHIM SIKORU

KANTON PERINGINAN
KABUPATEN, NAGARA PASIA

Membaca : Saya persembahkan dan
berkeinginan di _____ tanggal _____
bersekolah yang berkeinginan dengan ini

Membaca : a. Bahwa berkeinginan Kanton Kepala
Kantor Persembahkan Kabupaten/Nagara Pasia
_____ tanggal _____
Kepala _____ telah diberikan oleh
_____ dan telah akan _____
_____) , telah di (dan/berkeinginan _____
Kantoran _____ Kabupaten/ _____
Kantoran _____ Peringat _____
dengan berkeinginan membayar uang

persembahkan kepada Kepala _____ dan
_____)

b. Bahwa berkeinginan membayar uang
persembahkan kepada Kepala _____ di atas untuk
memerintahkan persembahkan persembahkan
dengan _____, sehingga persembahkan ini
memerintahkan persembahkan persembahkan
persembahkan uang persembahkan

c. Bahwa berkeinginan dengan persembahkan
persembahkan di atas, maka persembahkan
persembahkan persembahkan persembahkan
uang persembahkan persembahkan persembahkan
tidak membolehkan _____ dan tidak akan
dengan berkeinginan persembahkan, sehingga
dapat dipersembahkan untuk dipersembahkan

- Membaca :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1959
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959
 4. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1959
 5. Keputusan Presiden Nomor 100/101 Tahun 1959
 6. Keputusan Presiden Nomor _____ Tahun _____
 7. Keputusan Kepala Badan Persembahkan Nasional Nomor 1 Tahun 1959

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1979/No. Nomor 1 Tahun 1979
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1979
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun

DAFTAR TITEL:

**Menyusun
PERALAMAN**

- a. Menentukan apakah telah dilakukan di persyaratan-persyaratan yang diperlukan apakah Negara dan pemerintah baik atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan/atau Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya tahun Rp. [.....]
- b. Menyusun yang pemerintah apakah negara dan pemerintah baik atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, harus dilengkap/ditama dan ditandatangani

Indeks selanjutnya: 9 (sembilan) bulan selanjutnya sejak tanggal keputusan ini.

REVISI : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidaklengkapan/kesalahan dalam penerapannya, keputusan ini akan dianggap kembali sebagaimana semula

REVISI : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DIKEMUKAKAN DI :
 PADA TANGGAL :

**KAPALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN/KOTAMADYA**

KAPALA :

DIKEMUKAKAN Keputusan ini disyahkan di kepala file :

1. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

1. Rapat Bilang Hiti-Hiti atas Tanah Badan Persewaan Nasional, Jakarta.
2. Rapat Bilik Kerjasama Badan Persewaan Nasional, Jakarta.
3. Rapat Bilik Hakikat dan Hubungan Masyarakat Badan Persewaan Nasional, Jakarta.
4. Rapat Kantor Wilayah Badan Persewaan Nasional Propinsi _____
5. Rapat/Workshop/Konsep Rapat Daerah Tingkat II _____
6. Rapat Sekeloa Pembinaan Hiti-Hiti atas Tanah Kantor Persewaan Kabupaten/Kotamadya _____
7. Rapat Kantor Pembinaan dan Sos. Negara _____
8. Rapat Kantor Rakyat Bumi dan Masyarakat _____

KANTOR MELAYU BUKIT MELANGKAP NAGALAI
PROPINSI _____

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR MELAYU BUKIT MELANGKAP NAGALAI
PERALIHAN NAGALAI PROPINSI _____

NOMOR _____

TENTANG

PEMBERIAN PERPADANGAN JAJALA/BAKTI
PERPADANGAN LUKIS PERPADANGAN DAN PERPADANGAN
DAM MELAYU BUKIT MELANGKAP NAGALAI
BUKIT MELANGKAP NAGALAI

PROPINSI _____

KANTOR _____ NAGALAI _____

KEPALA KANTOR MELAYU BUKIT MELANGKAP NAGALAI
NAGALAI PROPINSI _____

Membaca : Saya persalahkan dan _____
bertekadlah di _____ tanggal _____
tempat ini yang bertepatan dengan ini

Membaca : a. Bilaka berdasarkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Badan Persewaan Nasional
Propinsi _____ tanggal _____ Nomor
_____ kepada _____ telah attention
Hiti _____ atas tanah ulian _____ Hiti _____
_____) bertekadlah di
tempat/tentukan _____ bertekadlah _____

Kelengkapan/Keutuhan: (bagian
..... dengan kelengkapan tersebut
yang pemenuhan kepada Negara adalah
Rp)

1. Dalam besarnya yang pemenuhan tersebut
tersebut a. di atas sangat memudahkan
pemenuhan dilaksanakan dengan adanya
selengkapnya pemenuhan baik pemenuhan
perencanaan jangka waktu pemenuhan
yang)
2. Dalam selengkap dengan pemenuhan
tersebut di atas, maka pemenuhan
perencanaan jangka waktu pemenuhan
yang pemenuhan dimaksud dipandang
tidak memadai syarat dan tidak sesuai
dengan kebijakan Pemerintah sehingga
diperlukan pemenuhan yang ditambahkan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
1961
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
1961
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1961
5. Keputusan Presiden Nomor 101/61 Tahun
1961
6. Keputusan Presiden Nomor Tahun
.....

7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional/Nomor 1 Tahun 1961
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1
Tahun 1961
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun
1961/No. Nomor 1 Tahun 1961
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun
1961
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor
..... Tahun

(Sifat/STATUS)

Mendapat
PERINTAH :

1. Memberikan kepada
tersebutlah di perijinan
jangka waktu pemenuhan yang pemenuhan
kepada Negara dan pemenuhan baik atas
tersebutnya selengkap dimaksud dalam
Tahun tahun dan hari
Keputusan Kepala Badan Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi
sehingga)
2. Pihak lain yang pemenuhan kepada
negara dan pemenuhan baik atas tersebutnya
selengkap dimaksud pada huruf a di
atas, harus dilayani benar dan ditambahkan.

Salanya adalah lambanya 4 (jumlah)
Indonesia yang yaitu tanggal kepresmen ini.

KEPADA : = Apabila diketahui bahwa terdapat
kekurangan/kelebihan dalam penempatan
kepresmen ini akan tetapi sudah sudah
sebagaimana mestinya.

KEPADA : = Kepresmen ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

DIKEMENTERIAN RI : _____

PEJABAT TERTANGGUNG : _____

**KEPADA KANTOR MELAKUKAN
KELAS PERALIHAN NASIONAL,
PRATAMA _____**

KEPADA :

KEPADA KANTOR Kepresmen ini ditandatangani Kepala/Pejabat :

1. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Jakarta.

2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II

3. Bupati/Walikota/Pejabat Setda (atau Kepala Badan
Pertanahan Nasional) Jakarta.

4. Kepala Badan Kemitraan (Badan Pertanahan
Nasional) Jakarta.

5. Kepala Badan Teknik dan Pelayanan Masyarakat
Badan Pertanahan Nasional Jakarta.

6. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat III

7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/
Kotamadya _____

8. Kepala Kantor Pertanahan dan KAN Negeri,

9. Kepala Kantor Penguji Bumi dan Bangunan _____

Lampiran 04
Formulir (Form 001)

BALAI PENELITIAN NASIONAL

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRIKULTUR
KEPALA BALAI PENELITIAN NASIONAL
NOMOR _____**

(SINGKAT)

**PERUBAHAN PERANGKAPAN (ANGKA/URUTAN)
PEMBAYARAN DOKUMEN/PERALIHAN DAN/PEMANGKAPAN
DOKUMEN KEPUTUSAN**

**MENTERI NEGARA AGRIKULTUR / KEPALA BALAI
PENELITIAN NASIONAL
DANJALAN _____ NOMOR _____**

**MENTERI NEGARA AGRIKULTUR /
KEPALA BALAI PENELITIAN NASIONAL,**

Membaca : Surat permohonan dari _____,
berkedudukan di _____ tanggal _____,
kemungkinan yang bersangkutan dengan ini _____.

Merasang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri
Negara Agraria / Kepala Balai
Perencanaan Nasional tanggal _____
Nomor _____ kepada _____ telah
diberikan hak _____ atas tanah seluas
_____ Ha (_____),
terletak di Desa/Kelurahan _____,
Kecamatan _____.

Kelurahan/Kecamatan _____, Kabupaten
_____ dengan luasnya sebanyak _____
yang permohonan kepada Menteri Agraria
Rp _____ (_____).

- b. Bahwa besarnya uang pemenuhan surat hak
tersebut a di atas sangat memudahkan
pembayar (pembayar dengan alasan),
sehingga pemenuhan hak pemenuhan
perpajakan (pajak) untuk penyelesaian
uang pemenuhan.
- c. Bahwa selubung dengan pemenuhan
tersebut di atas, maka pemenuhan
perpajakan (pajak) untuk penyelesaian
uang pemenuhan tersebut dipandang
tidak memadai agar dan tidak sesuai
dengan kebijakan Pemerintah sehingga
diperluarkan dengan pemenuhan tersebut.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
1960;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
1960;
 4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1960;
 5. Keputusan Presiden Nomor 141/61 Tahun
1960;
 6. Keputusan Presiden Nomor _____ Tahun _____.

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977)
2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999)
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun.....)

ditulis/ditandatangani:

Mengetahui
Pembuat

- a. Mengetahui Kepala
berkedudukan di perantara
yang telah melakukan penyusunan yang
perantara Kepala Negara dan
perantara ini dan atau melalui
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
..... pasal dan pasal Peraturan
Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional nomor (p)
[.....]
- b. Penyusunan yang perantara Kepala
Negara dan perantara ini dan atau melalui
sebagaimana dimaksud pada pasal a di
atas, telah dibuat berdasarkan dan ditandatangani
dengan sah dan ditandatangani
dengan sah dan ditandatangani
ditandatangani sebagai tanggapan atas.

MINA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan/kesalahan dalam penyusunan,
keputusan ini akan dianggap batal
sebagaimana mestinya

MINA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Jakarta,
Pada Tanggal :

MENTERI/DEKATASACARA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL

MINA :
.....
.....

DITANDATANGI Keputusan ini ditandatangani sebagai berikut :

1. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
2. Bupati/Walikota/Pid.Pid. dan Wakil Badan Pertanahan
Nasional (jawa)
3. Kepala BPP/Korwil/Badan Pertanahan Nasional (jawa)
4. Kepala BPP Wilayah dan Pelaksana Masyarakat Badan
Pertanahan Nasional (jawa)

5. Ditanda Pengesahan Untuk Isuasi Pasca-tanda Badan Perencanaan Nasional Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Perencanaan Nasional Propinsi _____
7. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II _____
8. Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten/Kotamadya _____
9. Kepala Kantor Perwakilan Kecamatan dan Kota Negeri, _____

KANTON PERENCANAAN KABUPATEN/KOTA _____

KEPULAUAN/KAPALAN KANTON PERENCANAAN
 KABUPATEN/KOTA _____
 NOMOR _____

DENGAN
 BUNDAKARAN PERPANJANGAN (SANGKALAN)
 PEMBAYARAN LAIN PEMBAYARAN ALIEN/RENTAN
 KEPALA KANTON PERENCANAAN
 KABUPATEN/KOTA _____
 LANGGAL _____ NOMOR _____

KEPALA KANTON PERENCANAAN
 KABUPATEN/KOTA _____

Membaca : Saya persalahkan dan _____
 berkebalikan di _____ tanggal _____
 sesuai ketentuan yang berhubungan dengan itu

Melampirkan : a. Balok berkebalikan Kepuasan Kepala
 Kantor Perwakilan Kabupaten/Kotamadya
 _____ tanggal _____ Nomor _____
 kepada _____ untuk diberikan oleh
 _____ atau tanda lain _____ NO/_____
 _____ } tertanda di
 Desa/Kelurahan _____ Kecamatan
 _____ Kabupaten/Kotamadya _____

Republik dengan kewajiban membayar uang pemenuhan kepada Negara sebesar Rp., [.....]

- b. bahwa kewajiban membayar uang pemenuhan tersebut bersifat di atas uang yang mencantumkan pecahan (plasmadent) dengan desain, sehingga pecahan baik memuatkan pengperincian gambar untuk pencegahan uang pemenuhan
- c. bahwa oleh karena pemenuhan tersebut tidak memuatkan gambar dan tidak mencantumkan dengan kecapaian Pemerintah, maka pemenuhan tersebut tidak dapat ditukarkan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1960
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960
4. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1960
5. Keputusan Presiden Nomor 124/61 Tahun 1961
6. Keputusan Presiden Nomor Tahun
7. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 1 Tahun 1960

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1957
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 1 Tahun 1959a Nomor 1 Tahun 1959
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 1 Tahun 1959
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor Tahun

MEMUKAHLAN

Mengucapkan
PERATURAN

1. Menetapkan pemenuhan pengperincian gambar yang pemenuhan kepada Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dan Undang-Undang Keputusan Kepala Badan Perencanaan Nasional/Ketentunya sebesar Rp., [.....] dan dan/atau/tersebutlah ini

MEMUKAHLAN

1. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidaklengkapan/kekurangan dalam pemenuhannya, keputusan ini akan dianggap batal/tersebutlah ini

MEMUKAHLAN

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

IDENTIFIKASI : _____
Induk Organisasi : _____

KEPALA KANTOR PERKANTORAN
KANTOR MELAYU MALAYSIA _____

KANTOR MELAYU MALAYSIA PERKANTORAN NASIONAL
PEPANG _____

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR MELAYU MALAYSIA
PERKANTORAN NASIONAL PEANG _____
NOMOR : _____

TENTANG

MINJARAN PERPANJANGAN (SUKSES) /
PERUBAHAN LAIN PERALIHAN ALIH KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR MELAYU MALAYSIA PERKANTORAN
NASIONAL PEANG _____
TANGGAL _____ NOMOR _____

KEPALA KANTOR MELAYU MALAYSIA PERKANTORAN
NASIONAL PEANG _____

Menjadi : Satu perubahan dari _____
terbitnya di _____ tanggal _____
kepada _____ yang berkaitan dengan itu

Meningkatkan : a. Bilan berdasarkan Keputusan Kepala
Kantor Melayu Malaya Perkantoran Nasional
Peang _____ tanggal _____ Nomor
_____ kepada _____ telah attention
Fid _____ dan telah akan _____ bill
[_____] ditandatangani di

KEPUTUSAN : _____

IDENTIFIKASI Keputusan ini disampaikan kepada YB :

1. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Perantoran Nasional,
Johore
2. Menteri/Kepala Daerah Negeri I _____
3. Menteri Kelir (M.K.K.) dan Tanah Badan Perantoran
Nasional Johore
4. Kepala Biro Kemajuan Badan Perantoran Nasional Johore
5. Kepala Biro Haluan dan Halangan Masyarakat Badan
Perantoran Nasional Johore
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Perantoran Nasional Perang

7. Menteri/Ministeranya Kepala Daerah Negeri II

8. Kepala Setia Haluan dan Tanah Kantor Perantoran
Kemajuan Kemajuan _____
9. Kepala Kantor Perantoran dan Hal Negeri _____
10. Kepala Kantor Pajak Bumi dan Rancangan _____

Lampiran 01
Formulir Ikn-011

Dana/Tabungan Keselamatan
Kebudayaan/Ketamaduan Bahasa
..... dengan konsepnya menyangkut
sangat pemukiman kepala Negara sebagai
Raja)

b. Bahasa bahasa yang pemukiman tersebut
bertutur di atas sangat memperhatikan
pemukiman (kemungkinan dengan adanya
salingnya pemukiman bagi memperhatikan
perpindahan/jangka waktu pemukiman
yang pemukiman.

c. Bahasa tidak hanya pemukiman tersebut
tidak memahami syarat dan tidak sesuai
dengan kebiasaan pemukiman, maka
pemukiman tersebut tidak dapat
dibuktikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960
2. Peraturan Perundang-undangan Nomor 40 Tahun
1996)
3. Peraturan Perundang-undangan Nomor 30 Tahun
1997)
4. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1998)
5. Keputusan Presiden Nomor 100/14 Tahun
1998)
6. Keputusan Presiden Nomor Tahun
.....

3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 Tahun 1988)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (No. 1
Tahun 1977)

5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun 1981/No. Nomor 2 Tahun 1981)

6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1981)

7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor
..... Tahun.....)

(Sifat/USK/USK)

Menyatakan
PERUMAHAN

1. Menunjuk pemukiman perpindahan jangka
waktu pemukiman yang pemukiman kepala
Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang bertutur dan bertutur Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten sebagai Raja
.....) dan
dengan/keberhasilan di.....

KEPUTUSAN

1. Apabila dibuktikan bertutur sangat sangat
keberhasilan/keberhasilan dalam pemukiman,
keputusan ini akan dianggap kembali
sebagaimana mestinya

MEMORANDUM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : _____
PADA TANGGAL : _____

**KAPALA KANTOR/WILAYAH/DAIRAH
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**

MEMORANDUM :

MEMORANDUM Keputusan ini menetapkan kapala/PA :

1. Menteri Negara Agraria/Kapala Badan Pertanahan Nasional Jakarta
2. Gubernur Kapala Daerah Tingkat I _____
3. Bupati Kepala Wilayah dan Tanah Badan Pertanahan Nasional Jakarta
4. Kapala Bina Saranaga Badan Pertanahan Nasional Jakarta
5. Kapala Bina Teknik dan Kelengkapan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional Jakarta

- a. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II _____
- b. Kapala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota/Kecamatan _____
- c. Kapala Kantor Pendaftaran Tanah dan Hak/Negara _____
- d. Kapala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan _____

Lampiran 01
Formulir (form 001)

BAHAN PERHIMPATAN NASIONAL

**REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BAHAN PERHIMPATAN NASIONAL
NAMA**

BERANGK

**PENGALAMAN PREPARASI/ANALISA BAHAN
PELAYANAN LAIN (KONS. PERALAN & ENERGI/ILAHAN)
MENTERI NEGARA AGRIKULTUR /
KEPALA BAHAN PERHIMPATAN NASIONAL
BANGGAL _____ NAMA _____**

**MENTERI NEGARA AGRIKULTUR /
KEPALA BAHAN PERHIMPATAN NASIONAL**

Member : Nama perusahaan dan _____
berkedudukan di _____ tanggal _____
kemungkinan yang terdampak dengan ini _____

Mentoring : a. Baku berdasarkan Keputusan Menteri
Negara Agraria / Kepala Bahan
Perumahan Nasional tanggal _____
Nama _____ kepada _____ telah
diterbitkan Hal _____ dan telah akan
_____ (M) _____) terdapat di
Rasa/Keputusan _____ Keputusan
_____ Kabupaten/Kotamadya _____

Pengini _____ dengan kesediaan
membayar yang pemukiman kepada
Negara sebesar Rp. _____) _____)

- b. Baku secara yang pemukiman tersebut
terdapat a di atas sangat memudahkan
pemohon (pemukiman dengan akan),
sehingga pemohon telah membebaskan
perpajakan pajak untuk pemukiman
yang pemukiman
- c. Baku telah secara pemukiman tersebut
tidak membebaskan pajak dan tidak akan
dengan kebijakan Pemukiman, maka
pemukiman tersebut tidak dapat
dibebaskan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
1964
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
1962
 4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1961
 5. Keputusan Presiden Nomor 183/61 Tahun
1961
 6. Keputusan Presiden Nomor _____ Tahun _____
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1
Tahun 1972

4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1999
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun.....)

DAFTAR LAMPIRAN:

**Menyatakan
PENGALIHAN**

- Menaklahi persetujuan pengalihan jangka waktu pembayaran uang pertanahan kepada Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tahun dan buku Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rp.,)) dan tentang/berkekuatan di

MEMUKA

- Apabila dikawatirkan hal tersebut dapat mengakibatkan/berakibat dalam prosesnya, keputusan ini akan dianggap kembali sebagaimana mestinya.

MERATA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPADA: (KOP)
BANDARA TUNGGALREJO,

KEPADA: (KOP)
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPADA:

.....

MEMUKA: (KOP) Keputusan ini disampaikan kepada: (KOP)

1. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
2. Bupati/Bupati Wakil atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta
3. Kepala Badan Kesatuan Badan Pertanahan Nasional Jakarta
4. Kepala Badan Pertanahan dan Pertanahan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional Jakarta
5. Direktur Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah Badan Pertanahan Nasional Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Regional
7. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II
8. Kepala Kantor Pertanahan/Kabupaten/ Kecamatan
9. Kepala Kantor Perbadan/Berbadan dan lain-lain Negara,